

KATA PENGANTAR

Rencana strategis Kantor Camat Touluaan Selatan 2018 - 2023 ini disusun dalam rangka mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara periode 2018 s.d 2023 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 s.d 2023. Untuk mewujudkan visi, misi, kebijakan dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara dimaksud, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Touluaan Selatan.

Dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya dan memperhatikan lingkungan strategis baik intern maupun extern organisasi, Kantor Camat Touluaan Selatan untuk Lima Tahunan (2018 – 2023) bertekad mewujudkan visi dan misi sebagaimana direncanakan dalam renstra SKPD ini.

Disamping sebagai Dokumen Perencanaan, Renstra SKPD ini juga akan menjadi Bahan Evaluasi dan Tolok Ukur Capaian Kinerja Kantor Camat Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Akhirnya, semoga pelaksanaan Renstra-SKPD ini dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya aparatur di Kabupaten Minahasa Tenggara yang tercinta ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Bergulirnya bola reformasi di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintah daerah telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah dan masyarakat untuk mengaktualisasikan dan mengeksplorasi diri menuju peradaban masyarakat modern, demokrasi, adil, makmur dan sejahtera. Otonomi daerah telah merubah paradigma pembangunan di daerah dari sentralistik ke desentralistik.

Pelaksanaan otonomi daerah mengandung esensi bahwa setiap daerah diberikan keleluasan untuk mengatur, mengurus dan membiayai rumah tangganya sendiri yang berimplikasi pada peningkatan pelayanan masyarakat untuk kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah itu sendiri.

Kabupaten Minahasa Tenggara dunia yang masih dikategorikan sangat muda telah banyak memberikan dampak positif dan berarti bagi Pemerintah dan masyarakat dalam berbagai sektor dan dimensi baik pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Pembangunan yang dilakukan dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan (*incremental*) yang terutama tidak hanya pembangunan secara fisik tetapi fokus pada pembangunan sumberdaya manusia yang tidak hanya pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi terpenting adalah dapat membuka cakrawala berpikir yang semakin luas, memiliki kematangan birokrasi dan profesionalisme dalam pemerintahan yang berdaya saing, etos kerja dan moral serta memiliki kematangan berdemokrasi untuk seluruh komponen masyarakat.

Kecamatan Touluaan Selatan sebagai bagian integral dari Kabupaten Minahasa Tenggara adalah salah satu Kecamatan yang dimekarkan dari Touluaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan disegala sektor dengan perencanaan pembangunan yang lebih terarah sesuai dengan rencana strategi yang akan ditetapkan melalui dokumen rencana kerja yang akan dijadikan kerangka acuan (*Term Of Reference*) pelaksanaan program dan kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban tersebut diatas, sangatlah diperlukan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai acuan baik dalam hal anggaran yang bersifat asumtif dan indikatif maupun program/kegiatan sebagai pedoman sehingga dalam pelaksanaannya akan lebih terarah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, CPengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan REncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun Tentang Kecamatan

14. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dan Penetapan SPM
15. SEB Meneg PPN/Kepala BAPPENAS Dan Mendagri 008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007
16. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kecamatan Di Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3. Maksud Penyusunan Rencana strategis

1. Rencana Strategis satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan wakil Bupati Minahasa Tenggara yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan /pembinaan kemasyarakatan khususnya di Wilayah Kecamatan berdasarkan skala prioritas.
2. Menyusun strategi pembangunan kedepan untuk wilayah Kecamatan Touluaan Selatan sebagai perwujudan amanat Undang – Undang Dasar 1945, terutama dalam pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat sesuai peraturan perundang – undangan.
3. Untuk menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
4. Sebagai pedoman/kerangka acuan (Term Of Reference) dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan.
5. Untuk mengevaluasi dan mengukur target capaian kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Penyusunan RENSTRA
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Visi dan Misi Kepala Daerah
- 3.2. Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

BAB VII. PENUTUP.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perlu diketahui keadaan umum Kecamatan Touluaan Selatan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

➡ Kondisi Geografis

Luas Wilayah : 66.40 Km²

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kecamatan Touluaan Kab.Minahasa Tenggara

- Sebelah Timur : Kecamatan Motoling Timur Kab.Minahasa Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Tombatu Kab.Minahasa Tenggara
- Sebelah Selatan: Kecamatan Ranoyapo Kab.Minahasa Selatan

➤ Luas Wilayah

Secara administrasi pemerintahan Kecamatan Touluaan Selatan mempunyai luas wilayah kepolisian 66.40 Km² dengan jumlah desa 10 dan memiliki 31 jaga.

Nama Desa	Jumlah Jaga	Luas Wilayah (KM/2)	Nama Hukum Tua	Ket
Kalait	4 (empat)	6.43	Olce Tompoliu	
Kalait Satu	4 (empat)	6.77	Nofrie V. Boki	
Kalait Dua	4 (empat)	0.52	A.Jhonson Lendo	
Kalait Tiga	4 (empat)	3.10	Royke Tarek	
Ranoako	3 (tiga)	4.75	Meidy Tangel	
Bunag	2 (dua)	0.08	Helena Kalangi	
Tambelang	4 (empat)	4.00	Jusak Mangangantung	
Lowatag	2 (dua)	4.50	Semmy Mokat	
Banga	2 (dua)	10.25	Ritha Ratulangi	
Suhuyon	2 (dua)	3.93	Rut Damongilala	
Jumlah	31 Jaga		10 Desa	

Tugas dan Fungsi

➤ Tugas

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah
- b. Menyelenggarakan Tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana, fasilitas pelayanan umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
- Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa

➡ **Fungsi**

- a. Pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum
- b. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- c. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang pertanahan
- d. Pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan pembangunan bidang social dan kesejahteraan masyarakat
- e. Pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanahan.

2.1.2. Struktur organisasi

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, terdiri dari :

1. Camat
 2. Sekretaris Kecamatan
 3. Kepala Seksi Pemerintahan
 4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 5. Kepala Seksi Pelayanan Trantib
 6. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
 7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 8. Kasubag Kepegawaian Kepegawaian
 9. Kasubag Keuangan
- (terlampir)

2.2. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Touluaan Selatan mempunyai 15 (enam Belas) orang PNS dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	PENDIDIK N	KET
1	SILFIA MAKAENAS, SE 196102261993101001	Pembina Utama muda/ IVB	Camat	S 1	
2	FRANS KOMALIG 195908181986021004	Penata Tkt I/ III D	Sekretaris	S 1	
3	FERDY SANDAK 196410211987122002	Penata TKT I/III B	Kasi Pemerint	S 1	
3	MAXI AGOW,S.Sos 196410211987122002	Penata / III C	Kasi PD	S 1	
4	NOVARI LANAWAANG 196809201989031004	Penata TKT I/III B	Kasi Trantib	SMU	
5	KALARA SIANTURI 198407072010011015	Penata TKT I/III B	Kasi ekonomi pembangunan	S 1	
6	ARTHUR SIWU, S.IP 198304122010011012	Penata /III B	Kasi Kesos	S 1	
7	MARLINA BATUBUAYA, SE 198003102010012024	Pengatur Muda Tkt I/ IIb	Fungsional Umum	S 1	
8	FRANS RONDONUWU 196207052007011013	Pengatur Muda Tkt I/ IIb	Sekdes	SMA	
9	SEMUEL MOMONGAN 196404052007011027	Pengatur Muda Tkt I/ IIb	Sekdes	SMA	
10	DEBI TUMIGOLUNG 196002082007011002	Pengatur Muda Tkt I/ IIb	Sekdes	SMA	
13	VRELLY SAUBA 197510262010012003	Pengatur Muda Tkt I/ IIb	Sekdes	SMA	
14	LINA MOKAT 197412302010012008	Pengatur Muda Tkt I/ IIb	Sekdes	SMA	
15	JEFRY LANGI 197006282010011003	Juru Muda Tkt I/ Id	Sekdes	SLTP	

Komposisi Menurut Pangkat dan Golongan Ruang

GOL. RUANG	A	B	C	D	E	JUMLAH
IV	1	-	-	-	-	1
III	-	2	4	1	-	7
II	-	6	-	-	-	6
I	-	-	1	1	-	2
Total	-	-	-	-	-	15

Komposisi Jabatan Struktural

ESELON	FORMASI	TERISI	LOWONG
III A	1	1	-
IIIB	1	1	-
IV A	7	5	-
Jumlah	9	7	2

2.2.2 Peralatan/Inventaris

Pemerintah Kecamatan Touluaan Selatan dalam melaksanakan tugas masih menggunakan gedung/bangunan milik sendiri.

Adapun inventaris Kantor Kecamatan Touluaan Selatan yang menjadi asset Pemerintah adalah sebagai berikut :

NAMA/JENIS BARANG	MERK TYPE	CARA PEROLEHAN	TAHUN	JUMLAH	KEADAAN	HARGA (Rp)
4	5	8	9	11	12	14
Papan Nama Instansi	Lokal	APBD 2010	2010	1 UNIT	BAIK	500.000
Kursi kerja	Lokal	APBD 2010	2010	1 UNIT	Baik	2.500.000
PC/Komputer PC	LG/powerUp	APBD 2010	2010	1 UNIT	Baik	6.990.000
Printer	Canon/IP2770	APBD 2010	2010	1 UNIT	Rusak	745.000
UPS	Prolink/Pro700	APBD 2010	2010	1UNIT	BAIK	475.000
Meja kerja	Lokal	APBD 2010	2010	4 BUAH	BAIK	2.000.0000
TV monitor	Sharp	APBD 2012	2012	1 BUAH	BAIK	2.000.000
Mesin Absensi	Secure/SE21	APBD 2013	2013	1 BUAH	RUSAK	7.495.500
Laptop	Toshiba	APBD 2013	2013	1 UNIT	Rusak	6.000.000
Printer	Canon/pixma MP	APBD 2013	2013	1 STEL	Rusak	1.600.000
Genset	Yamamax/3200 VR	APBD 2014	2014	1 Unit	Baik	4.950.000
Sound system	DAT	APBD 2014	2014	1 set	BAIK	8.000.000
Camera/vidio	CANON/ eos rebel	APBD 2014	2014	1 UNIT	BAIK	11.220.000
Laptop	Acer/Aspire e14	APBD 2014	2014	1 UNIT	BAIK	14.795.000
Printer	Canon Pixma MP	APBD 2014	2014	1 Unit	Rusak	1.750.000
Proyektor+Attachme nt	Acer/QSV1401	APBD 2014	2014	1 UNIT	BAIK	9.90.000
Station Wagon	Daihatsu/xenia	APBD 2015	2015	1Unit	BAIK	134.759.000
Filling besi/metal	Frontline/5laci	APBD 2015	2015	1 UNIT	BAIK	5.000.000
Mesin Absensi	Solution/x103c	APBD 2015	2015	1 UNIT	BAIK	2.5000.000
Mesin Pomba air	Wasser/PH	APBD 2015	2015	1 UNIT	BAIK	3.000.000
Televisi	LG	APBD 2015	2015	1 UNIT	BAIK	4.463.000
Laptop	Hewlett/Packard	APBD 2015	2015	1 UNIT	BAIK	17.435.000
Handy Talky	Motorola/ CP 1660	APBD 2015	2015	1 UNIT	BAIK	3.500.000
Bangunan Gedung Kantor Permanen		APBD 2014	2014	1 UNIT	BAIK	730.000.000

2.2.3 Belanja SKPD

Belanja SKPD Kantor Camat Touluaan Selatan untuk Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut:

- Belanja Tidak Langsung Rp.
- Belanja Langsung Rp.
- Total Rp.

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Touluaan Selatan dapat dilihat dari beberapa Indikator kinerja:

- Meningkatkan pelayan administrasi perkantoran
- Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Meningkatkan Kesadaran partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- Meningkatkan Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan bahwa isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Minahasa Tenggara pada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tugas yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Optimalisasi, partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat
3. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD pada Pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan dan aturan yang berlaku. dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus di komunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.
Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta memberikan pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencakupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.

5. Kantor Camat adalah SKPD yang di pimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Sarana dan Prasarana belum memadai
7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat
8. Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang belum berjalan dengan baik.
10. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang optimal.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI SAAT INI	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN
			INTERNAL	EKSTERNAL	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi	Indikator Kegiatan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Anggaran 		Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi
Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	Kurangnya Partisipasi Masyarakat	Indikator Kegiatan Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya peran pemerintah Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Mental masyarakat 	Kurang sosialisasi kepada masyarakat

Tabel 3.2**Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

NO	Misi & Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor penghambat	Faktor Pendorong
MISI I :	Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi Hukum, Demokratis, Profesional, Melayani, Rukun dan Damai (Sukses Pemerintahan)			
1	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tidak memadainya pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi	Terbatasnya dana	Tersedianya dana siap tahun
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tidak memadainya pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi	Terbatasnya dana	Tersedianya dana siap tahun
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Tidak memadainya pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi	Terbatasnya dana	Tersedianya dana siap tahun
4	Program partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Masih kurangnya partisipasi masyarakat	Mental masyarakat	Semangat kebersamaan

3.2 Visi Misi Kepala Daerah Periode 2013-2018

➤ **Visi :**

"Mitra yang Berdaulat, Berdikari, dan Berkepribadian"

- **Berdaulat** : Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang bebas dari segala macam gangguan agar dapat menjalani kehidupan yang aman, sentosa dan makmur.
- **Berdikari**: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang sejahtera, sehat dan cerdas dengan kemampuan untuk menjadi unggul di segala bidang.
- **Berkepribadian**: Terwujudnya masyarakat Minahasa Tenggara yang mempunyai budaya moderen dan agamis serta berkepribadian/jatidiri yang dinamis, kreatif, inovatif, disiplin, berdayatahan dan mampu ikut mewarnai proses globalisasi.

➤ **Misi :**

1. Mewujudkan Kepemerintahan yang menjunjung Supremasi Hukum, Demokratis, Profesional, Melayani, Rukun dan Damai (Sukses Pemerintahan).
2. Mewujudkan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pemberdayaan Masyarakat)
3. Mewujudkan perekonomian yang handal berbasis Potensi Bahari, Pertanian (Kelapa), dan Pariwisata serta Iklim Investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (sukses Perekonomian Daerah
4. Mewujudkan Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Meningkatkan Aksesibilitas Transportasi, Telekomunikasi, Energi Listrik, Air Bersih, serta Pemerataan Pembangunan Hingga ke Perkampungan dan Pesisir (Sukses Pembangunan)
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Asri, Lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (Sukses Lingkungan Hidup)

➤ **TUJUAN :**

Membangun Minahasa Tenggara menjadi Kabupaten yang Maju di Sulawesi Utara melalui pelibatan secara langsung masyarakat dan pelaku bisnis bersama-sama dengan pemerintah dalam perencanaan dan proses pembangunan daerah, serta mengelola dan memanfaatkan sumberdaya berkelanjutan menuju masyarakat berbudaya, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

3.3 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan

1.Lingkungan Internal

➤ **Kekuatan:**

- Visi dan misi organisasi yang jelas
- Kekuatan hokum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
- Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan
- Adanya sarana dan prasarana

➤ **Kelemahan:**

- Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
- Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
- Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi Tehknis tingkat Kecamatan dengan Pemerintah Kecamatan.
- Jabatan struktural dan jumlah PNS yang masih minim.

2.Lingkungan Eksternal

➤ **Peluang:**

- RPJM Kabupaten Minahasa Tenggara
- Agenda Pembangunan Tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Komitmen Kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Pemerintah Kecamatan
- Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
- Diklat penigkatan kualitas aparatur
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
- Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

➡ **Ancaman:**

- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
- Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
- Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemebrdayaan masyarakat
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami yang mengalami penurunan kualitas
- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang peraturan-peraturan
- Tingkat partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan disegala dimensi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

4.1. Visi dan Misi

Sebagai sinkronisasi dengan Visi Kabupaten Minahasa Tenggara, maka visi pemerintah

Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

➡ **Visi :**

“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Touluaan Selatan yang Berdaulat, Berdaya saing dan Sejahtera”

Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan pembinaan perangkat pemerintah kecamatan dan desa;
2. Melaksanakan pelayanan umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Membangun koordinasi dengan semua dinas, instansi, dan kelompok masyarakat dalam rangka pembangunan kecamatan Touluaan Selatan yang berkualitas;
4. Melaksanakan penatausahaan bidang administrasi, kepegawaian, keuangan dan aset;
5. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang ekonomi, pembangunan, pertanahan, kesejahteraan masyarakat, ketertiban dan pelayanan umum masyarakat.

➡ **Misi :**

1. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang mengedepankan Pelayanan Pemerintahan yang baik dan Bersih (Good And Clean Gonernance) supremasi

- hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan)
2. Menunjang program pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mewujudkan program kesehatan murah dan keringanan biaya kesehatan bagi yang kurang mampu melalui kegiatan pos-pos pelayanan kesehatan terpadu dan tepat sasaran. Termasuk penyiapan sarana pelayanan kesehatan yang representative (poskesdes di setiap desa dan rumah sakit daerah).
 3. Bersama dengan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mengupayakan terwujudnya sistem Perekonomian yang handal berbasis potensi pertanian terutama tanaman Palawija.
 4. Bersama dengan Pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara mengupayakan terciptanya iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif. (Sukses Perekonomian)
 5. Mewujudkan Kecamatan Touluaan Selatan sebagai kawasan Agropolitan
 6. Maksimalisasi pemeliharaan lingkungan hidup dan ketahanan ekosistem hayati guna keamanan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara khusus pelestarian kawasan hutan lindung di wilayah Kecamatan Touluaan Selatan

➡ Tujuan dan sasaran Jangkah Menengah

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan Misi , ditetapkan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Wilayah Kecamatan Touluaan Selatan sebagai Kawasan yang Aman, Damai dan Berbudaya yang didasari Kerukunan mengedepankan Pluralisme dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika.
2. Terwujudnya Pemerintahan yang Demokratis dalam prinsip moral dan etika yang memprioritaskan supremasi dan kepastian hukum.
3. Terwujudnya Pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance).
4. Terwujudnya layanan pendidikan yang memadai.
5. Terwujudnya penyiapan sarana pelayanan kesehatan yang representative (poskesdes di setiap desa).
6. Terwujudnya sebagai kawasan wisata pantai dan wisata bawah laut

7. Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi dalam rangka pengentasan Kemiskinan dengan sitem ekonomi yang berbasis Agraris dan serta ekonomi kerakyatan melalui penggalakan Pengelolaan potensi sumberdaya alam dibidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
8. Meningkatnya Pemeliharaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Ekosistem Hayati guna keamanan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam.
9. Terpeliharanya jati diri dan budaya lokal.

Tabel 4.1
Keterhubungan antara Tujuan Dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
Pencapaian Target SKPD	Tercapainya target SKPD	Presentase Pencapaian target SKPD (kegiatan rutin, dll)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Standar Pelayanan Kepada Masyarakat	IKM (Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat)	2,5	2,7	2,9	3,2	3,5
Mensukseskan program pemerintah Kabupaten	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Prosentase SKPD yang taat aturan dalam pelaksanaan program kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dengan menitikberatkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan pada rencana strategis maka kecamatan Touluaan Selatan mempunyai :

➡ ***Tujuan :***

Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial.

➡ ***Sasaran :***

Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa koordinasi, pelayanan pembinaan, pengawasan di kecamatan Touluaan Selatan secara optimal.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Touluaan Selatan sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Touluaan Selatan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Touluaan Selatan adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

Berikut analisis SWOTnya

1. Peluang

- a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
- c. Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrasytruktur dan lingkungan
- d. Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar
- e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sector informal lainnya
- f. Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten

2. Ancaman

- a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- b. Wujud kerjasama antar daerah secara lebih konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.
- c. Inefisiensi dalam sistem transparansi Kabupaten dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir.
- d. Tidak adanya investor yang masuk
- e. Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok tertentu.
- f. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

3. Kekuatan

- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. SDM secara kuantitatif sangat memadai
- c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
- d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Touluaan Selatan.
- e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.
- f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

4. Kelemahan

- a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
- b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.

- d. Manajemen keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.
- e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal).
- f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

	<p><u>Kekuatan (<i>Strengths</i>) :</u></p> <p>a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.</p> <p>b. SDM secara kuantitatif sangat memadai</p> <p>c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.</p> <p>d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Touluuan Selatan.</p> <p>e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi data statistik pembangunan.</p> <p>f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.</p>	<p><u>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) :</u></p> <p>a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.</p> <p>b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.</p> <p>c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.</p> <p>d. Manajemn keuangan organisasi relative masih kurang terkelola secara optimal.</p> <p>e. Beberapa bentuk produk yang dihasilkan relative kurang begitu berfungsi (kualitas produk yang dihasilkan relative kurang optimal).</p> <p>f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.</p> <p>g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang fokus.</p>
--	---	---

<u>Peluang (Opportunities) :</u>	<u>Strategi SO</u>	<u>Strategi WO</u>
<p>a. Keberadaan UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara dan UU No.25/2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik</p> <p>c. Kerjasama dengan pengusaha swasta dalam pembangunan infrasystruktur dan lingkungan kota</p> <p>d. Penciptaan kebijakan yang kondusif dan pro pasar</p> <p>e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Pertanian dan sector informal lainnya</p> <p>f. Transfaransi terhadap produk yang dihasilkan oleh pemerintah kota</p>	<p>- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran</p> <p>- Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan</p> <p>- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur</p>	<p>- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</p> <p>- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</p> <p>- Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan</p>
<u>Ancaman (Threats) :</u>	<u>Strategi ST</u>	<u>Strategi WT</u>
<p>a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).</p> <p>b. Wujud kerjasama antar daerah secara lebih</p>	<p>- Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran</p> <p>- Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan</p> <p>- Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan</p>	<p>- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa</p> <p>- Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah</p> <p>- Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi</p>

<p>konkrit dan nyata membutuhkan waktu yang relative lama.</p> <p>c. Inefisiensi dalam sistem transparansi kota dan adanya potensi biaya ekonomi akibat banjir.</p> <p>d. Tidak adanya investor yang masuk</p> <p>e. Kebijakan yang dihasilkan bias kepentingan pada kelompok tertentu.</p> <p>f. Tingginya arus urbanisasi, maraknya PKL degradasi terhadap eksistensi lingkungan kota, kekumuhan serta instabilitas keamanan kota.</p> <p>g. Banyaknya kebijakan kota yang terkoreksi.</p> <p>h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran</p>		kemasyarakatan
--	--	----------------

Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Touluaan Selatan, adapun strategi Kecamatan Touluaan Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
5. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

Kebijakan adalah arah / tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Touluaan Selatan yaitu :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan
3. Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
4. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa
5. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah
6. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakat

Tabel 4.2
Rumusan Strategi & Arah Kebijakan

Tujuan	sasaran	Indikator Sasaran	Program	Strategi	Kebijakan
Mencapai target SKPD	Tercapainya target SKPD	Presentse pencapaian target SKPD	1.Program pelayanan administrasi perkantoran, 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apatur, 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Melaksanakan pelayanan administrasi perkatoran
Meningkatkan pelayanan Kepada Masyarakat	Meningkatnya standart pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)		Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	Mengoptimalkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan
Mensukseskan program Pemerintahan Kabupaten	Suksesnya program Pemerintah Kabupaten	Prosentase SKPD yang taat aturan dalam pelaksanaan program kegiatan		Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan	Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemerintah Kecamatan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Program Dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maka program-program yang direncanakan akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan makanan dan minuman
- 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 9) Rapat-rapat koordinasi kedalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

- 1) Pengadaan kendaraan dinas/sepeda motor
- 2) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
- 4) Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur :

- 1) Dilat struktural bagi PNS daerah

d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya

e. Program Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan :

- 1) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

❖ **Program Umum meliputi :**

➔ **Program bidang pemerintahan.**

- Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

- Memperkuat fungsi koordinasi wilayah dengan Muspika, semua aparat dan Kelembagaan yang ada
- Peningkatan Kamtibmas
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
- Peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Desa
- Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanahan
- Peningkatan kualitas Pemilihan Hukum Tua

➔ **Program Bidang Pembangunan**

- Peningkatan potensi Sumber Daya Alam
- Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia
- Pemanfaatan wilayah potensial dalam rangka pengembangan kawasan Minapolitan
- Pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan untuk Ladang Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan dalam menunjang Program Revitalisasi Pertanian
- Pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbangcam Tahun 2019
- Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten
- Perencanaan dan Pengadaan Lokasi serta Sarana Kantor-kantor Pemerintahan dan Fasilitas Umum lainnya antara lain : Kantor Cabang Dinas, Puskesmas, Sekolah lanjutan atas/SMK/SMA, Lapangan Kecamatan dll
- Pengadaan Lapangan Olahraga

➔ **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- Peningkatan Kerukunan Sosial
- Peningkatan Kerukunan Antar Golongan Agama
- Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap masalah Kamtibmas.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disajikan dengan menggunakan matrik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Presentse pencapaian target SKPD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (IKM)		2,5	2,7	2,8	3,5	3,5	3,5
3.	Prosentase SKPD yang taat aturan dalam pelaksanaan program kegiatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan Kantor Camat Touluaan Selatan sebagai penjabaran visi dan misi serta mengacu pada tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rencana strategis ini disusun setelah melalui kajian-kajian, sehingga dapat merumuskan visi, misi, tujuan yang dapat dicapai, kemudian dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Pelaksanaan Rencana strategis ini akan terus di evaluasi secara berkala dan akan dilaporkan berdasarkan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan terwujudnya berbagai kegiatan yang telah direncanakan diharapkan untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dapat mewujudkan visi dan misinya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai penikmat pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Demikian rencana strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman kerja Kantor Camat Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara kemudian dapat dibahas dalam Forum SKPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) serta besar harapan kami Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara khususnya di Kecamatan Touluaan Selatan.

Touluaan Selatan, Januari 2018

CAMAT TOULUAAN SELATAN,

SILFIA S. MAKENAS, SE
NIP. 19681010 198803 2 006